

**PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TERPADU**

(Kasus Program Indonesia Juara Pada 3 Lokasi Piloting di Sulawesi Selatan)

Abdul Malik Faisal

NIM: E043202006



**PROGRAM DOKTOR SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

**PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TERPADU**

(Kasus Program Indonesia Juara Pada 3 Lokasi Piloting di Sulawesi Selatan)

Disertasi

Salah satu Syarat Mencapai Gelar Doktor

Abdul Malik Faisal

043202006

**PROGRAM DOKTOR SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Terpadu
(Study Kasus Program Indonesia Juara pada 3 Lokasi Piloting di
Sulawesi Selatan)**


Disusun dan diajukan oleh

Abd. Malik Faisal

E043202006

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 15 Juli 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Promotor,



Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, SU
NIP 194809131978031001

Ko - Promotor I



Prof. Dr. Rabina Yunus, MA.
NIP 196011231986032001

Ketua Program Studi
Ilmu Sosiologi,



Dr. Rahmat Muhammad, M.Si
NIP 197005131997021002

Ko - Promotor II



Prof. Hasbi Marissangan, M.Si., Ph.D
NIP 197012311998021002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si
NIP 197508181008011008

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Disertasi yang berjudul "PENGEMBANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERPADU" (Kasus Program Indonesia Juara Pada 3 Lokasi Piloting Di Sulawesi Selatan) merupakan hasil karya saya sendiri.
2. Karya Tulis Ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Program Doktor baik di Universitas Hasanuddin maupun di perguruan tinggi lain.
3. Karya Tulis Ilmiah ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dari tim promotor.
4. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan sebagai referensi dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 2024

Yang Menyatakan



Abdul Malik Faisal

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan syukur Alhamdulillah, kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan disertasi ini. Disertasi ini telah melalui proses revisi berdasarkan bimbingan dan arahan dari Promotor dan Copromotor serta masukan dari Dewan Penguji.

Oleh karena itu, kami menghaturkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. HM. Tahir Kasnawi, SU selaku Promotor dan Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si serta Prof. Dr. Drs. Hasbi, M.Si., Ph.D. selaku Copromotor atas bimbingan dan arahan selama proses penyusunan disertasi ini.

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat kontemporer, tantangan dan kompleksitas persoalan sosial semakin menjadi fokus utama dalam kajian ilmu sosiologi. Dalam konteks ini, penulis dengan penuh dedikasi dan semangat ilmiah mempersembahkan disertasi ini dengan judul "Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Terpadu (Kasus Program Indonesia Juara Pada 3 Lokasi Piloting di Sulawesi Selatan)" sebagai kontribusi dalam pemahaman mendalam terhadap peran serta masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial.

Selama melalui proses perkuliahan banyak tantangan yang dihadapi. Namun dalam konteks ilmu pengetahuan, terjadi diskusi, bimbingan dan dialektika untuk mencapai hasil ilmu pengetahuan sebagaimana dijabarkan dalam disertasi ini. Tentu saja keseluruhan proses yang berlangsung dalam perjumpaan-perjumpaan akademik, penulis mendapat inspirasi dan masukan dari berbagai pihak, khususnya civitas akademika Universitas Hasanuddin, baik secara struktural maupun secara individual. Karena itu apresiasi dan rasa terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si dan para pimpinan FISIP atas arahan dan motivasi untuk menyelesaikan studi ini.

3. Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Budu, Ph.D., Sp.M (K)., M.MedEd dan jajarannya atas pelayanan akademik yang telah diberikan.
4. Ketua Departemen Sosiologi FISIP Unhas, Drs. Hasbi, Ph.D atas bimbingan dan motivasi selama mengikuti proses akademik dan penelitian ini.
5. Ketua Program Studi S3 Sosiologi FISIP Unhas, Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si atas segala bimbingan dan arahan, baik dalam proses pembelajaran dalam kelas maupun selama bimbingan penelitian.
6. Para dosen Program Studi S3 Sosiologi FISIP Unhas, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Secara khusus, penulis menghaturkan terimakasih kepada Dewan Penguji dan semua pihak yang telah memberi saran dan masukan untuk penyempurnaan Disertasi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi S3 Sosiologi FISIP yang selalu bersemangat menimbah ilmu dan berproses bersama. Para informan yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk kami wawancarai.
9. Terima kasih yang tak terhingga atas dukungan moril dan semangat dari seluruh keluarga kami terutama Istri dan anak-anak tercinta Andi Rahmania, Muh. Malfin, Alya Amalia, Muh. Fauzi, Andi Muttiara dan Andi Maharani
10. Terakhir kami persembahkan karya kami ini kepada ayahanda alm. Faisal Yusuf dan Ibunda alm. Aisyah
12. Kepada semua pihak terimalah karya kami yang sangat sederhana ini semoga dapat bermamfaat bagi kepentingan masyarakat banyak.

Makassar

Abdul Malik Faisal

ABSTRAK

ABDUL MALIK FAISAL. *Pengembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Terpadu: Studi Kasus Program Indonesia Juara pada Tiga Lokasi Piloting di Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh HM. Tahir Kasnawi, Rabina Yunus, dan Hasbi).

Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program *Indonesia Juara* (Jaringan Usaha untuk Sejahtera) di Desa Ara Kabupaten Bulukumba, Desa Cabbeng Kabupaten Bone, dan Kelurahan Rappokalling Kota Makassar. Program *Indonesia Juara* bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan terpadu, pengembangan klinik bisnis, klinik parenting, klinik remaja, dan klinik literasi di desa atau kelurahan. Pendekatan yang digunakan ialah metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui wawancara kepada empat puluh fasilitator dari tiga desa. Pada pendekatan kualitatif, informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian secara kuantitatif menggunakan analisis radar sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemberdayaan pada program *Indonesia Juara* pada tiga lokasi piloting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat delapan aspek untuk memetakan indikator keberhasilan atau kinerja pemberdayaan, meliputi lima aspek pemberdayaan yang terdiri atas: kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan pengendalian, serta tiga variabel yang menjadi pilar pemberdayaan yaitu: modal sosial, modal manusia, dan modal fisik. Aspek tertinggi ialah dimensi kesadaran kritis dan dimensi partisipasi dengan nilai 3,29; dimensi kesejahteraan dengan nilai 3,28; dimensi akses dengan nilai 3,24; modal manusia dan modal fisik dengan nilai 3,22; dan modal sosial dengan nilai 3,21. Berdasarkan hasil tersebut, program *Indonesia Juara* berjalan dengan baik dan berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat. Secara kualitatif program *Indonesia Juara* berbasis *people centered development* yang bukan semata-mata untuk meningkatkan manfaat material. Namun, lebih luas dalam membangun martabat manusia dibutuhkan aspek-aspek antara lain: (1) *capacity*, (2) *equity*, (3) *empowerment*, (4) *sustainability*, dan (5) *interdependence*. Melalui program pemberdayaan *Indonesia Juara* pada tiga lokasi piloting telah terintegrasi program-program yang sudah ada, serta optimalisasi aset atau modal fisik, manusia, dan sosial yang ada.

Kata kunci: pemberdayaan, potensi, klinik terpadu, *Indonesia Juara*



ABSTRACT

ABDUL MALIK FAISAL. *The Development of Integrated Community Empowerment Program: A Case Study of the Indonesia Juara Program in Three Piloting Locations in South Sulawesi* (supervised by HM. Tahir Kasnawi, Rabina Yunus, and Hasbi)

This research aims to examine the implementation of community empowerment through the "JUARA" or Jaringan Usaha untuk Sejahtera (Business Network for Prosperity) program in the villages of Ara, Bulukumba Regency, Cabbeng, Bone Regency, and Rappokalling Subdistrict, Makassar City. The Indonesia JUARA program aims to enhance the well-being and capacity of communities through integrated empowerment, involving the development of business clinics, parenting clinics, youth clinics, and literacy clinics in villages or subdistricts. The research methodology employs a mixed-method approach, combining quantitative and qualitative methods. Quantitative data were obtained through interviews with 40 facilitators from three villages. For the qualitative approach, research informants were selected using purposive sampling technique. The quantitative research results in utilizing radar analysis as a tool to evaluate the performance of empowerment in the "Indonesia Juara" program in three piloting locations. There are eight aspects to map the indicators of success or empowerment performance, covering five empowerment aspects consisting of well-being, access, critical awareness, participation, and control, as well as three variables that are the pillars of empowerment, namely social capital, human capital, and physical capital. The highest aspect is the critical awareness dimension and the participation dimension with a value of 3.29, followed respectively by the well-being dimension with a value of 3.28, the access dimension with a value of 3.24, human capital and physical capital with a value of 3.22, and social capital with a value of 3.21. Based on these results, the Indonesia Juara program is running well and significantly contributes to community empowerment. Qualitatively, the Indonesia Juara program based on "people-centered development" is not solely intended to increase material benefits but also in a broader sense to develop human dignity that requires aspects such as capacity, equity, empowerment, sustainability, and interdependence. Through the "Indonesia Juara" empowerment program in three piloting locations, existing programs have been integrated, and the optimization of existing physical, human, and social assets has been achieved.

Keywords: empowerment, potential, integrated clinic, Indonesia Juara



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	9
C. TUJUAN PENELITIAN	10
D. MANFAAT PENELITIAN	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pemberdayaan dalam Perspektif Sosiologi	13
B. Defenisi Pemberdayaan.....	19

C. Konsep Kemiskinan.....	25
D. Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	28
E. Penelitian Terkait Sebelumnya.....	33
F. Kerangka Berpikir	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian.....	42
B. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	43
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	44
D. Peran Peneliti.....	46
E. Responden dan informan Peneliti.....	46
F. Jenis Dan Sumber Data.....	47
G. Teknik Pengumpulan Data.....	48
H. Teknik Analisis Data.....	48
I. Tahapan Penelitian.....	52
J. Defenisi Operasional.....	54

BAB IV LATAR SEJARAH LOKASI PENELITIAN

- A. Desa Ara Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba 57
- B. Desa Cabbeng Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone..... 59
- C. Kelurahan Rappokalling Kecamatan Tallo Kota Makassar..... 61

BAB V IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA JUARA DI SULAWESI SELATAN

- A. Program Indonesia JUARA..... 64
- B. Implementasi Program Indonesia Juara Berbasis Desa dan kelurahan..... 70
- C. Implementasi Klinik Terpadu Program Indonesia Juara..... 78
- D. Implementasi Pada 3 (tiga) Desa Piloting Program Indonesia Juara..... 88
- E. Inovasi Program Pemberdayaan Indonesia Juara.....106
- F. Tantangan Implementasi Program Indonesia Juara.....111

BAB VI KONDISI MASYARAKAT PADA PROGRAM INDONESIA JUARA DI SULAWESI SELATAN

- A. Modal Fisik, Modal Sosial dan Modal Manusia Pada Desa Ara, Desa Cabbeng dan Kelurahan Rappokalling.....114
- B. Strategi Pengelolaan Modal Fisik, Modal Sosial dan Modal Manusia Pada Program Indonesia Juara..... 136
- C. Grafik Radar Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Program Indonesia Juara..... 151

**BAB VII DUKUNGAN LINTAS ORGANISASI/LEMBAGA PADA PROGRAM
INDONESIA JUARA DI SULAWESI SELATAN**

A. Integrasi Modal Fisik, Modal Sosial dan Modal Manusia Pada Desa Ara, Desa Cabbeng dan Kelurahan Rappokalling.....	164
B. Sinergi Kemitraan Pentahelix Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	170
C. Peran Kepemimpinan Kolaboratif Dalam Program Indonesia Juara di Sulawesi Selatan.....	174

BAB VIII SIMPULAN, IMPLIKASI TEORITIS DAN KEBIJAKAN

A. Simpulan	179
B. Implikasi Teoritis dan Kebijakan.....	183
C. Saran dan Rekomendasi.....	185

Daftar Pustaka

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan Teori Pembangunan

Tabel 2.2 Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 5.1 Kegiatan Indonesia Juara 3 (tiga) lokasi piloting

Tabel 5.2 Strategi Program Indonesia Juara

Tabel 6.1 Komponen Modal dalam Pemberdayaan

Tabel 6.2 instrumen tolok ukur keberhasilan program pemberdayaan

Tabel 6.3 Bagan Radar Indikator Indonesia Juara

DAFTAR GRAFIK

Grafik 6.2 Ketersediaan sarana produksi pertanian

Grafik 6.3 Ketersediaan sarana Pendidikan

Grafik 6.4 Ketersediaan sarana Kesehatan

Grafik 6.5 Ketersediaan sarana bidang perekonomian

Grafik 6.6 Ketersediaan sarana transportasi

Grafik 6.7 Keaktifan warga dalam kegiatan sosial

Grafik 6.8 Kepedulian warga terhadap sesama

Grafik 6.9 Ketaatan warga terhadap norma-norma

Grafik 6.10 Hubungan harmonis sosial kemasyarakatan

Grafik 6.11 Hadirnya lembaga sosial keagamaan

Grafik 6.12 Terdapat saling kepercayaan sesama warga

Grafik 6.13 Terdapat program peningkatan SDM

Grafik 6.14 Terdapat kelompok pemuda

Grafik 6.15 Kemampuan Aparatur Desa

Grafik 6.16 Terdapat tokoh berpengalaman

Grafik 6.17 Warga mengikuti Pendidikan formal

Grafik 6.18 Warga mengikuti Pendidikan non formal

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Klinik Terpadu

Gambar 2.2 Skema Kerangka Pikir

Gambar 3.1 Diagram Radar atau Spider Graph

Gambar 3.2 arus analisis data kualitatif

Gambar 3.3 Bagan Alir Penelitian

Gambar 5.1 *Stakeholder* Eksternal dan Internal Program Indonesia

Juara

Gambar 5.2 Peta Stakeholder Program Indonesia Juara

Gambar 5.3 Alur perencanaan klinik terpadu

Gambar 5.4 Implementasi dan proses kerja klinik terpadu Indonesia

Juara

Gambar 6.1 Hasil bagan radar program pemberdayaan Indonesia

Juara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan merupakan peringkat ke-4 dunia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah China, India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 281.603.800 jiwa. Angka ini meningkat dan akan terus meningkat. Diproyeksi di tahun 2025 jumlah penduduk akan mencapai 284 juta jiwa. Angka ini membawa Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk keempat terbanyak di negara G20 (world meter, 2022).

Bagi negara yang memiliki penduduk sangat besar akan membawa banyak keuntungan bagi kesejahteraan apabila sumber daya manusia bisa dikelola dengan baik. Indonesia yang mempunyai penduduk terbesar ke-4 dunia memberikan keuntungan berupa ketersediaan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang melimpah, membantu percepatan proses pembangunan nasional dan munculnya wirausaha dari kalangan masyarakat.

Dengan jumlah penduduk sangat besar tantangan bagi bangsa Indonesia berupa kuantitas penduduk yang tinggi namun tidak berbanding lurus dengan kualitas yang dimiliki tiap individu. Indonesia dengan jumlah penduduk sangat besar masih terkategori negara berkembang sehingga

kemiskinan merupakan isu utama yang selalu menjadi pembahasan dari tahun ketahun. Dengan penduduk besar dan kaya akan sumberdaya alam namun masih terdapat banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Sedangkan angka kemiskinan 26,5 juta atau 9,71 persen. Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa disparitas kemiskinan di pedesaan dan perkotaan Indonesia masih tinggi. Pada Maret 2022, tercatat 7,5 persen dari seluruh penduduk Indonesia merupakan penduduk miskin di perkotaan. Sedangkan di pedesaan, persentase jumlah penduduk miskin mencapai 12,29 persen (Novrizaldi, 2022)

United Nations Development Program (UNDP) sebagai jaringan pembangunan global PBB mengukur kesejahteraan masyarakat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit dari tiga indikator sektor pembangunan: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2021 mencapai 72,29, atau tumbuh melambat 0,49 persen dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, sebesar 71,94. BPS menyebutkan peningkatan IPM tahun 2021 dibandingkan dengan 2020 didorong oleh peningkatan dari seluruh dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2021).

Mencermati proses perjalanan kehidupan sosial kebangsaan saat ini tidak dipungkiri Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain di dunia, antara lain pendidikan, kesehatan, pembangunan di bidang infrastruktur, energi, pangan dan beberapa sektor lainnya. Demikian juga dengan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia bangsa kita masih jauh kalah dari bangsa lain.

Pada tahun 2019 peringkat Indonesia pada *Global Talent Competitiveness Index (GTCI)* menempati posisi 67 yang kemudian meningkat keposisi 65 di tahun 2020 dari 132 Negara. Peringkat daya saing Indonesia di tingkat ASEAN kalah dengan Singapura di tingkat pertama dengan skor 78.48, disusul Malaysia (60.04), Brunei Darussalam (52.17). Sementara itu, Indonesia ada di peringkat kelima dengan skor 41,81 hanya unggul dari negara Thailand, Vietnam, Laos, dan Kamboja (Ilham, 2023).

Sementara itu, IMD atau *Institute for Management Development*, lembaga independen yang berpusat di Swiss dan telah eksis selama 75 tahun telah merilis peringkat daya saing negara-negara dunia atau *World Competitiveness Ranking*. IMD pada tahun 2020 menempatkan Indonesia urutan ke-40 dari 63 negara. Daya saing Indonesia yang rendah dilaporkan IMD karena terjadi pertumbuhan tingkat kemiskinan akibat dari ketidakpastian ekonomi, penurunan ekspor-impor hingga ketidakberpikakan strategi khusus terhadap UMKM (Ilham, 2023).

Masalah sosial terutama kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan menjadi *concern* utama pemerintah Indonesia mulai pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan sampai Orde Reformasi sekarang ini. Dampak dari kemiskinan ini sangatlah luar biasa sebagai ketimpangan sosial dengan membiarkan sebagian masyarakat menderita dan bergelut dengan kesulitan hidup.

Persoalan kemiskinan itu terasa semakin terlihat karena telah berlangsung di negeri ini secara terus menerus, yang di mana negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya dalam sumber daya alamnya. Meskipun telah ada kebijakan pengurangan kemiskinan seperti Millenium Development Goals (MDGs) hingga tahun 2015 dan kelanjutannya, yaitu *Sustainable Development Goals (SDGs)* hingga saat ini, namun belum terlihat dampak positif pada penurunan angka kemiskinan secara global (Latief et al, 2022).

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin meminta jajaran pemerintah fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim setidaknya 1% pertahun. Hal ini disampaikan Ma'ruf saat membuka rapat yang membahas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Istana Wapres, Rabu (04/08/2022). Pemerintah Indonesia telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 431 triliun untuk menghapus kemiskinan ekstrem. (<https://www.idxchannel.com>).

Sementara dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan pada tanggal 2 Juli 2024 merilis jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada tahun 2024, dari total populasi sebanyak 9.463.385 jiwa, sekitar 736.480 orang atau 8.06 persen di antaranya hidup dalam kemiskinan (BPS Sulsel, 2024).

Berkaitan masalah kemiskinan dalam konteks masyarakat Indonesia dan negara dunia ketiga lainnya, pemberdayaan masyarakat menjadi *concern* publik dan dinilai sebagai salah satu pendekatan yang sesuai dalam mengatasi masalah sosial, terutama kemiskinan, yang dilaksanakan berbagai elemen mulai dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).

Konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang ada di suatu kelompok atau masyarakat. Dalam kajian sosiologi dan ilmu sosial, upaya tersebut lantas dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan metode yang dikembangkan dalam praktik pekerjaan sosial yang salah satu tujuannya adalah mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Upaya pemberdayaan masyarakat telah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak yang meliputi aspek pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat golongan warga tertentu yang ada di dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan (Sudarmanto et al., 2022) .

Sejak pemerintahan Orde Baru berbagai program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga. Salah satu yang terkenal adalah Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat miskin melalui pengembangan sumberdaya manusia, modal, dan usaha produktif serta pengembangan kelembagaan. Program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya adalah : PPK (Program Pengembangan Kecamatan) yang dilaksanakan Departemen Dalam Negeri, P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) yang dilaksanakan Departemen Pekerjaan Umum, P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) yang dilaksanakan Departemen Pertanian, PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang dilaksanakan Departemen Kelautan dan Perikanan, KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang dilaksanakan Departemen Sosial, dan lain-lain.

Program-program tersebut berjalan sendiri-sendiri menurut kebijakan Departemen yang bersangkutan, tidak terintegrasi, parsial dan sektoral. Berbagai hasil penelitian yang mengkaji implementasi program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat tersebut, melaporkan berbagai keberhasilan dan juga ketidak-berhasilan program-program tersebut.

Membangun Indonesia yang maju, mandiri dan berdaulat dimulai dari desa sebagai ujung tombak pemerintahan, garda terdepan pelayanan

publik, sekaligus tempat hidup tradisi dan adat istiadat. Penduduk desa juga menjadi sumber paling utama dalam kemiskinan. Sehingga jika desa maju, maka Indonesia akan maju.

Pembangunan terhadap desa sudah cukup lama akan tetapi sampai saat ini masih terdapat persoalan yang dihadapi desa dan membutuhkan penyelesaian segera. Program-program yang ada lebih menunjukkan kebijakan pemerintah yang *top down*, karena kebanyakan konsepnya lahir dari konsepsi pejabat atau pihak di luar desa, mengabaikan konteks lokal desa dan pemerintah cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek kebijakan pemerintah semata.

Akibatnya yang terjadi bukanlah tumbuhnya kemandirian dan daya saing desa, akan tetapi ketergantungan dan pragmatisme desa terhadap program pemerintah, desa juga hanya menjadi arena perebutan dukungan politik. Disisi lain, masih terjadi paradigma pembangunan yang sangat sektoral dengan masing-masing lembaga atau kementerian memiliki program ke desa sesuai urusannya, tanpa memperhatikan dimensi kewilayahan dan sinkronisasi dengan sektor lain.

Keberhasilan pembangunan merupakan upaya memadukan berbagai sektor dalam suatu wilayah tertentu. Keterpaduan tersebut membutuhkan pengelolaan yang terpadu dan kerjasama antar-stakeholder yang terlibat. Sehingga membangun desa adalah proses yang multidimensional dan melibatkan segenap stakeholder yang saling bekerjasama. Pembangunan desa merupakan proses merespon tiga

lingkungan desa (alam, budaya dan sosial ekonomi) dengan cara yang tepat.

Pembangunan desa tidak bisa dilepaskan dengan pembinaan berbasis keluarga. Keluarga merupakan unit dasar masyarakat yang berperan penting dalam menghasilkan SDM yang berkualitas, Kapasitas keluarga mempunyai keberfungsian dan keberlangsungan masyarakat. Banyak masalah sosial yang terjadi berawal dari kegagalan/ketidakberfungsian keluarga sehingga menimbulkan berbagai implikasi sosial dan ekonomi dikalangan masyarakat desa.

Menyadari hadirnya berbagai tantangan dalam mengelola dan membangun negara besar Indonesia, hanya bisa terwujud semua elemen bangsa bersatu, optimis, percaya diri. Visi Indonesia 2045 sudah dirumuskan, menuntut pihak dan elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam mengatasi setiap tantangan dengan memberikan masukan dan pemikiran. Indonesia juga mendapatkan bonus demografi yang terjadi *once in a lifetime*. Kesempatan emas yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Program perubahan INDONESIA JUARA (jejaring usaha untuk sejahtera) adalah ikhtiar bersama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 'berdaulat, maju dan makmur dengan membangun masyarakat mandiri, sehat dan cerdas serta tumbuh saling menguatkan satu sama lain.

Program yang merupakan implementasi dari program perubahan pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) tingkat 1 digagas dengan

pendekatan keluarga dan komunitas desa atau kelurahan. Keluarga sebagai tempat pendidikan pertama dan utama ; berbasis desa/kelurahan menjadikan komunitas di desa/kelurahan sebagai subyek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup program Indonesia Juara melalui pengembangan klinik terpadu sebagai organisasi atau perkumpulan orang-orang yang memiliki profesi konsultan, fasilitator, pendamping dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Klinik terpadu ini berbentuk kelompok kerja yang bersifat fungsional yang mensinergikan semua potensi yang ada di desa. Program ini juga memadukan pendekatan online dan offline (luring dan daring).

Dengan gambaran di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat situasi pemberdayaan masyarakat pada 3 (tiga) desa yang menjadi lokus program Indonesia Juara serta melihat implementasi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dari program sebagai salah satu model pemberdayaan masyarakat

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pemberdayaan masyarakat di desa Ara Kabupaten Bulukumba, Desa Cabbeng Kabupaten Bone dan kelurahan Rappokalling kota Makassar melalui program Indonesia Juara?

2. Bagaimanakah kondisi masyarakat di desa Ara Kabupaten Bulukumba, Desa Cabbeng Kabupaten Bone dan kelurahan Rappokalling kota Makassar setelah mendapatkan program pemberdayaan Program Indonesia Juara?
3. Apakah dukungan lintas organisas/lembaga yang diberikan dalam program Indonesia Juara memberikan pengaruh terhadap keberhasilan program pemberdayaan di desa Ara Kabupaten Bulukumba, Desa Cabbeng Kabupaten Bone dan kelurahan Rappokalling kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis model pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan pendekatan klinik terpadu.
2. Menganalisis kondisi masyarakat desa/kelurahan yang mendapatkan program pemberdayaan Program Indonesia Juara.
3. Menganalisis pengaruh dukungan lintas organisas/lembaga terhadap keberhasilan program yang diberikan dalam program Indonesia Juara.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam menyusun strategi model pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan pendekatan klinik terpadu
- b. Secara teoritis penelitian ini berkontribusi dalam diskursus teori sosiologi dalam pemberdayaan masyarakat
- c. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam diskursus paradigma integrasi makro-mikro sosiologi.

2. Pragmatis

- a. Secara pragmatis, penelitian ini berkontribusi dalam mengidentifikasi dan memetakan faktor keberhasilan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan klinik terpadu
- b. Penelitian ini mengonstruksi dan mengabstraksi model pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan pendekatan klinik terpadu
- c. Pada gilirannya, hasil penelitian ini bermanfaat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan melalui model pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan pendekatan klinik terpadu

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Dalam Perspektif Sosiologi

Konsep pemberdayaan diadaptasikan dari istilah *empowerment* sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat Barat, terutama Eropa. Konsep ini muncul sejak abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an (Ife, 2008). Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan hingga saat ini.

Kemunculannya hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi, personalisme dan kemudian lebih dekat dengan gelombang Neo Marxisme, Freudianisme, Strukturalisme, dan Sosiologi kritik Frankfurt School. Bersamaan itu juga muncul konsep-konsep elit, kekuasaan, anti-establishment, gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi pembebasan dan civil society.

Mansour Fakih, dalam bukunya *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi* (2013), salah satu dari banyak hal yang mempengaruhi terbentuknya sebuah teori adalah apa yang disebut sebagai paradigma. Pembahasan mengenai paradigma ini perlu dilakukan mengingat pentingnya pengaruh paradigma terhadap teori dan analisis atas realitas sosial, karena pada dasarnya tidak ada satu pandangan atau satu teori

sosial pun yang bersifat netral dan objektif, melainkan bergantung terhadap paradigma yang digunakan.

Dalam konteks pemberdayaan, paradigma memiliki peran untuk membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara kita melihat suatu masalah, apa yang kita anggap sebagai masalah ketidakberdayaan itu, apa masalah yang kita anggap bermanfaat untuk dipecahkan serta metode apa yang kita gunakan untuk meneliti dan melakukan intervensi atas masalah tersebut. Begitu juga paradigma akan mempengaruhi apa yang tidak kita pilih, apa yang tidak ingin kita lihat, dan apa yang tidak ingin kita ketahui. Paradigma pula yang akan mempengaruhi pandangan seseorang mengenai apa yang 'adil dan tidak adil', baik-buruk, tepat atau tidaknya suatu program dalam memecahkan masalah sosial

Paradigma sosiologi merupakan 'cara pandang' dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Istilah paradigma awal mulanya diperkenalkan oleh Thomas Kuhn (1962, dalam Ritzer dan Douglas, 2010) dalam karyanya *'The Structure of Scientific Revolution'*. Paradigma merupakan suatu pandangan pokok mengenai persoalan yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Secara sederhana, paradigma juga bisa dipahami sebagai 'cara pandang' ilmuwan dalam melihat suatu persoalan. Konsep paradigma dipopulerkan dalam sosiologi oleh Robert Friedrichs (1970, dalam Ritzer dan Douglas, 2010) melalui karyanya *Sociology of Sociology*.

George Ritzer (1992, dalam Ritzer dan Douglas, 2010) menulis secara spesifik paradigma-paradigma yang ada dalam sosiologi. Ritzer

memaparkan tiga paradigma sosiologi sebagai ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial. Ketiga paradigma tersebut menegaskan bahwa sosiologi bukanlah ilmu yang berpandangan tunggal terhadap suatu pokok persoalan. Sosiologi adalah ilmu berparadigma ganda.

Sutoro Eko dalam *Desa Membangun Indonesia*, (2014) menyebutkan, pemberdayaan yang kini populer didorong oleh tiga hal: berkembangnya ilmu sosial berhaluan humanistik; munculnya paradigma pembangunan alternatif sebagai solusi (kritik) terhadap developmentalisme; serta gerakan *civil society* yang mendorong demokratisasi di belahan dunia.

Secara paradigmatik munculnya konsep pemberdayaan bisa dilacak dari perlawanan ilmu-ilmu sosial humanistik terhadap positivisme yang sudah lama menjadi ideologi hegemonik dalam tradisi ilmu-ilmu sosial. Positivisme adalah sebuah aliran dalam tradisi keilmuan yang hendak membersihkan pengetahuan dari kepentingan dan awal pencapaian cita-cita untuk memperoleh pengetahuan demi pengetahuan, yaitu teori yang dipisahkan dari praksis kehidupan manusia. Ia menganggap pengetahuan mengenai fakta obyektif sebagai pengetahuan yang sah. Ilmu, menurut positivisme, harus netral, bebas dari nilai, bebas dari kepentingan dan lain-lain (A. Giddens, 1975; V. Kraft, 1979).

Pengertian pembangunan melahirkan serangkaian pemikiran, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan

Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan alternatif lahir dari kajian kritis dari pertanyaan mengapa terjadi kemiskinan di tengah-tengah gencarnya proyek-proyek pembangunan?. Tumbuh pendapat yang kuat bahwa terjadinya kemiskinan di Dunia Ketiga disebabkan karena gagalnya model pembangunan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh teori modernisasi atau doktrin *developmentalisme*.

Terdapat beragam teori terkait modernisasi, namun terdapat satu hal bahwa faktor manusia dan bukan struktur/sistem yang menjadi faktor utama dalam perkembangan sebuah negara. Teori modernisasi berangkat dengan gagasan awal perubahan sosial yaitu perubahan dari tradisional ke modern, yang mencakup perubahan di sebagian besar sektor vital dalam masyarakat, terutama sektor ekonomi. Kemudian, perubahan sosial tersebut diwujudkan dalam suatu konstruksi modern dalam bentuk industrialisasi sesuai konsep barat.

Pemikiran *developmentalisme* ini muncul dan populer pada tahun 1950-an. Dalam konteks saat itu bagaimana membangun kembali tatanan dunia yang baru lepas dari Perang Dunia II dan menjawab munculnya negara-negara eks jajahan di Asia dan Afrika (Asmani, 2018). Teori pembangunan ditujukan guna mengatasi kemiskinan, pengangguran, serta meretas masalah kesehatan dan pendidikan yang terjadi.

Kenyataannya, teori-teori modernisasi tadi tidak berjalan seperti apa yang diinginkan. Banyak sekali kegagalan yang terjadi akibat teori-teori tersebut, dan bukannya mensejahterakan, justru semakin menambah pelik permasalahan negara-negara yang menggunakan teori-teori tersebut, seperti bertambahnya pengangguran, pertumbuhan yang tidak merata, bertambahnya kemiskinan dan lainnya. Keadaan ini menimbulkan reaksi keras dari para pemerhati masalah-masalah sosial yang kemudian mendorong timbulnya teori dependensi (Kartono, 2016).

Pandangan teori dependensi terhadap keterbelakangan menyatakan bahwa terjadinya keterbelakangan bukan karena pengaruh dari dalam negara itu sendiri, melainkan karena adanya interaksi dari luar yaitu kontak yang dilakukan dengan negara maju. Faktor luar yang paling menentukan keterbelakangan negara Dunia Ketiga adalah adanya campur tangan dan dominasi negara maju pada laju pembangunan di negara Dunia Ketiga (Suryono, 2021). Dengan campur tangan tersebut, maka pembangunan di negara Dunia Ketiga tidak berjalan dan berguna untuk menghilangkan keterbelakangan yang sedang terjadi, namun semakin membawa kesengsaraan dan keterbelakangan.

Pendekatan pembangunan sumber daya manusia merupakan suatu konsep pembangunan yang menempatkan manusia sebagai elemen utama dalam proses pembangunan. Fokus utama dari pembangunan manusia adalah untuk meningkatkan beragam pilihan dan menjadikan proses pembangunan lebih demokratis serta partisipatif. Salah satu

parameter yang dijadikan acuan adalah Indeks Pembangunan Manusia (Kasnawi, 2016).

Konsep pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran paruh abad ke-20, atau yang dikenal dengan aliran *post-modernisme*, dengan penekanan sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti-sistem, anti-struktur, dan anti-determinisme, yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan.

Konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa-sedarah dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran *post-modernisme*. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideternimisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan.

Munculnya konsep pemberdayaan merupakan akibat dari dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan tata-budaya sebelumnya yang berkembang di suatu Negara (Pranarka dan Vidhyandika,1996). Selanjutnya, perkembangan teori-teori pembangunan dari masa ke masa diuraikan oleh Jan Nederveen Pieterse (2006) yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perkembangan Teori Pembangunan

Trends in Development Theory

Table 1.1 *Meanings of development over time*

Period	Perspectives	Meanings of development
1800s	Classical political economy	Remedy for progress, catching up
1870 >	Latecomers	Industrialization, catching-up
1850 >	Colonial economics	Resource management, trusteeship
1940 >	Development economics	Economic growth – industrialization
1950 >	Modernization theory	Growth, political and social modernization
1960 >	Dependency theory	Accumulation – national, autocratic
1970 >	Alternative development	Human flourishing
1980 >	Human development	Capacitation, enlargement of people's choices
1980 >	Neoliberalism	Economic growth – structural reform, deregulation, liberalization, privatization
1990 >	Post-development	Authoritarian engineering, disaster
2000	Millennium Development Goals	Structural reforms

Sumber : . Pieterse : Development Theory, London, Sage, 2016

B. Defenisi Pemberdayaan

Banyak perspektif dan banyak cara memaknai pemberdayaan yang dikemukakan berbagai pihak. Konsep pemberdayaan muncul dari kegiatan dan upaya penguatan modal sosial yang ada di suatu kelompok atau masyarakat. Dalam kajian sosiologi dan ilmu sosial, upaya tersebut lantas dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan sendiri berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya

membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan.

Istilah pemberdayaan (*Empowerment*) adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat. Untuk memahami konsep *empowerment* secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang konsektual yang melahirkannya. Sebagaimana diungkapkan Bennis dan Mische (1995:45) bahwa “konsepsi pemberdayaan itu dapat diartikan sebagai upaya menghilangkan batasan birokrasi yang mengkotak-kotakkan orang dan membuatnya menggunakan seefektif mungkin keterampilan, pengalaman, energi dan ambisinya.”

Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan.

World Bank 2001 dalam Totok dan Poerwoko (2012: 27) mengartikan pemberdayaan yaitu: Upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan

kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Beberapa ahli mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan: (Suharto, 2010:58).

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai peningkatan pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya

Berkenaan dengan pengertian pemberdayaan masyarakat, Winarni dalam Sulistiyani (2004: 79) mengungkapkan bahwa pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, berarti pemberdayaan tidak saja

terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Menurut Rusmiyati (2011: 16) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.

Pemberdayaan menurut Suparjan dan Hempri (2003: 43), mengatakan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua arti yaitu *to give or authority* dan *to give to or enable*. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Pemberdayaan dapat didefinisikan setiap orang memperoleh pemahaman dan pengendalian kekuatan sosial, ekonomi, dan/atau politik untuk memperbaiki keberadaannya di masyarakat. Pemberdayaan itu terjadi melalui beberapa tahap.

Pertama, setiap orang mengembangkan kesadaran awal sehingga mereka dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki kehidupannya dan memperoleh berbagai keterampilan yang memungkinkan mereka melaksanakannya.

Kedua, melalui pengambilan tindakan, mereka mengalami keberdayaan dan kepercayaan dirinya meningkat.

Ketiga, karena adanya pertumbuhan keterampilan dan kepercayaan, setiap orang bekerjasama berusaha mempengaruhi keputusan dan sumberdaya yang mengakibatkan kesejahteraannya (Rifa'i, 2008:40).

Prijono dan Pranarka (1996: 88) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagai kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Konsep pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatoris telah banyak dibahas dalam berbagai sudut pandang oleh peneliti, perencana pembangunan, dan kalangan birokrat. Tanpa mengabaikan perbedaan-perbedaan pendapat yang muncul dari ketiga unsur yang telah dikemukakan di dalam Signifikansi Penelitian sebelumnya, pada umumnya literatur tentang pemberdayaan masyarakat

melalui pendekatan partisipatoris melihat distribusi sumberdaya sebagai fokus perhatian dan partisipasi masyarakat *inevitable, indispensable, or even mandatory*, kalau suatu perencanaan pembangunan dilakukan dengan pendekatan dan bawah ke atas (*bottom up planing*).

Rangkuman konsep pemberdayaan masyarakat diuraikan lebih lengkap oleh The United Nations Development Programme (UNDP, 1998) yang membagi 3 (tiga) level pemberdayaan tentang Capacity Building, yaitu pengembangan kapasitas menjadi 3, yaitu individual level, entity or organizational level, dan system level sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat	
Dimensi	Indikator
Level Individu: Pengembangan potensi dan keterampilan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan aset / modal • Kekuatan fisik • Tidak terisolasi • Penguasaan keterampilan • Keberfungsian lembaga usaha
Level Kelompok / Organisasi: Partisipasi dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan pengambilan keputusan • Pelaksanaan dan pengawasan keputusan bersama • Pemanfaatan hasil-hasil pembangunan
Level Sistem: Kemandirian masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan ketergantungan kepada bantuan luar

Sumber : UNDP, 1998 : *Capacity Assessment and Development in A System and Strategic Management Context*

C. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi yang tidak hanya terjadi di negara berkembang seperti Indonesia, di negara maju pun. kemiskinan masih banyak menimpa masyarakat atau penduduknya. Oleh sebab itu kemiskinan disebut sebagai problematika kemanusiaan yang dari dulu hingga sekarang masih menjadi perbincangan dan perdebatan di belahan dunia manapun.

Kemiskinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar miskin berarti tidak berharta, serba kekurangan sedangkan kemiskinan adalah hal miskin, keadaan miskin, situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.

Menurut Friedman dalam Suyanto (2013) kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Sementara itu, yang dimaksud dengan basis kekuasaan sosial menurut Friedman meliputi lima hal. Pertama, modal produktif atas aset misalnya tanah perumahan, peralatan, dan kesehatan. Kedua, sumber keuangan, seperti income dan kredit yang memadai. Ketiga, organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, seperti koperasi. Keempat, *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Kelima, informasi-informasi yang berguna untuk kehidupan (Suyanto, 2013: 2-3).

Dari gambaran di atas kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Menurut Levitan dalam Suyanto (2013:1) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Terdapat dua tipe kemiskinan yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Secara teoritis kemiskinan struktural yaitu keadaan miskin yang dialami oleh masyarakat dan bersumber dari struktur sosial (Suyanto, 2013:9). Kemiskinan kultural lebih kepada budaya, kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat seperti malas dan lemahnya etos kerja.

Selo Soemardjan mendefenisikan konsep kemiskinan struktural sebagai suatu keadaan yang dialami oleh masyarakat yang tidak mendapatkan hal akses untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Kemiskinan ini datang dari luar, artinya keadaan miskin bukan masyarakatlah yang mau tetapi keadaan miskin datang dari struktur kepemilikan tanah dan struktur sosial masyarakat. (Bagong Suyanto, 2013)

Kemiskinan secara kultural menurut Sunyoto Usman dalam Syahrizal (2006) mendekati masalah kemiskinan pada tiga level analisis; individual, keluarga dan masyarakat. Pada level individual ditandai dengan sifat yang lazim disebut *a strong feeling of marginality* seperti sikap parochial, apatisme, atau pasrah pada nasib, boros, tergantung dan inferior. Pada level keluarga ditandai oleh jumlah anggota keluarga yang besar dan *free union consensual marriage*. Kemudian pada level masyarakat terutama ditandai oleh tidak terintegrasi secara efektif dengan institusi-institusi masyarakat. Mereka seringkali dianggap sebagai objek yang perlu digarap dari pada sebagai subjek yang perlu diberi peluang berkembang.

Mengutip buku *Analisis Gender Terhadap Fenomena Sosial*, Rabina Yunus (2022: 29), kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan ini dapat berupa sikap malas, pemboros, kurang kreatif, dan relatif bergantung pada pihak lain.

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang di dalamnya terdapat suatu deprivation trap atau perangkap kemiskinan yakni kemiskinan itu sendiri, ketidakberdayaan, isolasi, kerawanan, kelemahan fisik. Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan dibandingkan dengan faktor lainnya (Chambers, 1987: 145). Kemudian

menurut Edi Suharto menunjuk pada situasi kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang dialami seseorang, baik akibat ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maupun akibat ketidakmampuan negara atau masyarakat memberikan perlindungan sosial kepada warganya (Suharto, 2009:16)

Berbagai program pun telah dirancang oleh para pemangku kepentingan (stake holder) untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Di Indonesia dari rezim ke rezim program pengentasan kemiskinan juga sudah diberikan seperti pemberian bantuan dana IDT (Inpres Desa Tertinggal), BLT (Bantuan Langsung Tunai), Raskin (Beras Miskin), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Pemberian Rumah Miskin untuk RTM (Rumah Tangga Miskin), KUR (Kredit Usaha Rakyat), penyediaan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi program bantuan kemiskinan yang ditujukan untuk keluarga miskin guna menekan angka kemiskinan dari tahun ke tahun.

D. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat perdesaan di Indonesia sangat penting dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia dimana mayoritas populasi penduduknya adalah masyarakat desa. Dapat dikatakan bahwa pembangunan masyarakat perdesaan merupakan kunci tolok ukur kesuksesan pembangunan nasional. Keberadaan desa sebagai unit pemerintahan terkecil, bahkan dalam batasan tertentu dapat diartikan sebagai miniatur negara.

Dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi masyarakat pedesaan di Indonesia bersifat multi-ragam, bukan hanya dalam hal semantik, namun juga dalam pola budaya berupa adat istiadat maupun struktur pranata sosialnya, hal ini menyebabkan kondisi setiap desa sangat berbeda antara satu desa di suatu daerah dengan desa di daerah lain.

Paradigma pembangunan nasional saat ini menempatkan wilayah pedesaan sebagai motor pembangunan dan menempatkan masyarakat pedesaan sebagai subjek pembangunan yang berpartisipasi aktif dalam seluruh aspek pembangunan. Hal ini cukup beralasan mengingat pedesaan merupakan tulang punggung transformasi perekonomian suatu bangsa. Pedesaan memainkan peran sebagai penyedia berbagai macam surplus perekonomian yang dibutuhkan untuk pembangunan sektor industri di kawasan perkotaan

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor

kehidupan (Sutoro Eko, 2002).

Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 12 didefinisikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pada pasal 67 ayat 2 juga menyebutkan bahwa desa berkewajiban untuk mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun masyarakat desa berhak untuk meminta dan mendapatkan informasi, dan mengawasi serta menyampaikan aspirasi mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa (pasal 68 ayat 1). Pemerintah desa di dalam program pembangunan diharuskan melakukan pemberdayaan masyarakat. Apabila pemerintah desa tidak

melakukan program pemberdayaan, maka masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya untuk mendorong terciptanya program pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Desa dapat mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat (pasal 94 ayat 1). Contoh lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Dasawisma, lembaga keagamaan, lembaga budaya, atau lembaga ekonomi.

Adapun pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah baik Provinsi atau Kabupaten memberdayakan masyarakat dengan a) menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa; b) meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan c) mengakui dan memfungsikan institusi asli atau yang sudah ada di masyarakat desa. Ketiga intervensi dari pemerintah tersebut dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaaan (pasal 112 ayat 3 dan 4).

Pada tingkat kawasan perdesaan, program pemberdayaan desa dimaksudkan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi (pasal 83 ayat 3). Program kerjasama antar-Desa pada tingkat kawasan dapat diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan (pasal 92 ayat 1 huruf b).

Lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 pada pasal 6 meliputi: a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, b. pelatihan teknologi tepat guna, c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; dan d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: - kader pemberdayaan masyarakat Desa; - kelompok usaha ekonomi produktif; kelompok perempuan, - kelompok tani, - kelompok masyarakat miskin, - kelompok nelayan, - kelompok pengrajin, - kelompok pemerhati dan perlindungan anak, - kelompok pemuda; dan - kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan ini menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Pemberdayaan juga merupakan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

E. Penelitian Terkait Sebelumnya

Hasil penelitian terkait penting diketengahkan dalam pembahasan ini untuk memposisikan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Penelitian Agung Utama, Titin Hera Widi Ariyani, yang berjudul Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Di Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten,” kesimpulannya yaitu perempuan miskin di Kecamatan Wedi masih tinggal di rumah yang tidak layak huni, memiliki akses pendidikan yang terbatas serta pendapatan yang rendah. Perempuan miskin di Kecamatan Wedi memiliki potensi yang tinggi dalam menjalani profesi kewirausahaan atau memiliki potensi tinggi sebagai calon entrepreneur atau wirausaha.

Penelitian dari Novira Kusri dkk yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal di Desa Jeruji Besar Kecamatan Sungai Kakap. Penelitian Novira dkk ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi mandiri. Program kemandirian pangan ini merupakan program aksi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk mengurangi rawan pangan dan gizi melalui pendayagunaan sumber daya, kelembagaan dan kearifan lokal pedesaan. Output yang dihasilkan adalah: 1) dari sisi ketersediaan pangan, terciptanya kemandirian diversifikasi produk pangan dan diversifikasi usaha dalam rangka

meningkatkan pendapatan keluarga yaitu masyarakat berhasil meningkatkan keterampilannya di dalam pengolahan pangan berbahan baku sumber daya lokal yaitu ikan, 2) terciptanya penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal untuk perbaikan gizi dan peningkatan pendapatan keluarga yaitu masyarakat berhasil meningkatkan keterampilannya di dalam memanfaatkan lahan pekarangan melalui media tanam hidroponik. Outcome yang dihasilkan adalah : 1) Meningkatnya modal 2) perubahan pola pikir masyarakat, 3) peningkatan ketrampilan dan aksesibilitas pangan; 4) Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi lintas sektor untuk pengembangan sarana dan prasarana pedesaan. Selain itu, adanya kerjasama tim yang kompak antara tim pelaksana IbDM, mahasiswa dan mitra IbDM. Hal ini terlihat dari kelancaran proses kegiatan dimulai dari orientasi, sosialisasi dan pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan kepada mitra PKK, pengolahan ikan dan gula merah. (Novira dkk., 2017: 139-150).

Sebelumnya, Christanto, (2015) Menganalisis pengaruh Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gundi dengan menggunakan metode kuantitatif penjelasan (eksplanatory) dengan teknik Korelasi. Variabel yang diteliti adalah Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Masyarakat. Hasil peneltiian menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Keberhasilan PNPM Mandiri Pedesaan terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. Perbedaan penelitian yaitu pada metode

analisis dan variabel yang digunakan, penelitian sekarang menggunakan metode statistik deskriptif dan PLS serta adanya penambahan variabel agrowisata. Sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode analisis Korelasi. Persamaan penelitian adalah penggunaan variabel pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat .

Santosa & Priyono, (2012) mengkaji hubungan sosial pada proses diseminasi model pemberdayaan masyarakat desa melalui pengelolaan agrowisata berbasis sumberdaya lokal dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif kuantitatif. Variabel yang diteliti adalah Agrowisata dan Pemberdayaan Masyarakat, Hasil penelitian menunjukkan ada ragam permasalahan eksternal dan internal yang merintang hubungan sosial komunikatif pada diseminasi model pemberdayaan. Masyarakat desa telah berupaya menyelesaikan berbagai rintangan sesuai kemampuan sumberdaya lokal. Hubungan sosial memiliki keberfungsian yang berarti dalam proses diseminasi model pemberdayaan masyarakat desa melalui pengelolaan agrowisata.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini menunjukkan adanya aspek kebaruan (*novelty*) terkait model pemberdayaan masyarakat. Inovasi dari proyek perubahan ini adalah merancang model pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan desa/kelurahan dengan metode pembelajaran secara daring dan luring, dengan menggunakan model pembelajaran dengan 4 (empat) pendekatan klinik, diantaranya :

- 1) **Klinik Bisnis terpadu**, layanan pelatihan dan pendampingan bisnis usaha produktif dan koperasi.
- 2) **Klinik Pemuda**, layanan pemberdayaan pemuda berbasis partisipasi meliputi kepemimpinan, kewirausahaan, olahraga dan kepeloporan pemuda.
- 3) **Klinik literasi**, pengembangan masyarakat berpengaruh melalui literasi digital berbasis data.
- 4) **Klinik Parenting**, pendampingan dan dorongan kepada masyarakat dibidang pemberdayaan keluarga terutama berkaitan dengan pola asuh anak.

F. Kerangka Pikir

Pembangunan terhadap desa sudah cukup lama akan tetapi sampai saat ini masih terdapat persoalan yang dihadapi desa dan membutuhkan penyelesaian segera. Program-program yang ada lebih menunjukkan kebijakan pemerintah yang *top down*, karena kebanyakan konsepnya lahir dari konsepsi pejabat atau pihak di luar desa, mengabaikan konteks lokal desa dan pemerintah cenderung menempatkan masyarakat sebagai objek kebijakan pemerintah semata.

Akibatnya yang terjadi bukanlah tumbuhnya kemandirian dan daya saing desa, akan tetapi ketergantungan dan pragmatisme desa terhadap program pemerintah, desa juga hanya menjadi arena perebutan dukungan politik. Disisi lain, masih terjadi paradigma pembangunan yang sangat

sectoral dengan masing-masing lembaga atau kementerian memiliki program ke desa sesuai urusannya, tanpa memperhatikan dimensi kewilayahan dan sinkronisasi dengan sektor lain.

Keberhasilan pembangunan merupakan upaya memadukan berbagai sektor dalam suatu wilayah tertentu. Keteraduan tersebut membutuhkan pengelolaan yang terpadu dan kerjasama antar-stakeholder yang terlibat. Sehingga membangun desa adalah proses yang multi dimensional dan melibatkan segenap stakeholder yang saling bekerjasama. Pembangunan desa merupakan proses merespon tiga lingkungan desa (alam, budaya dan sosial ekonomi) dengan cara yang tepat.

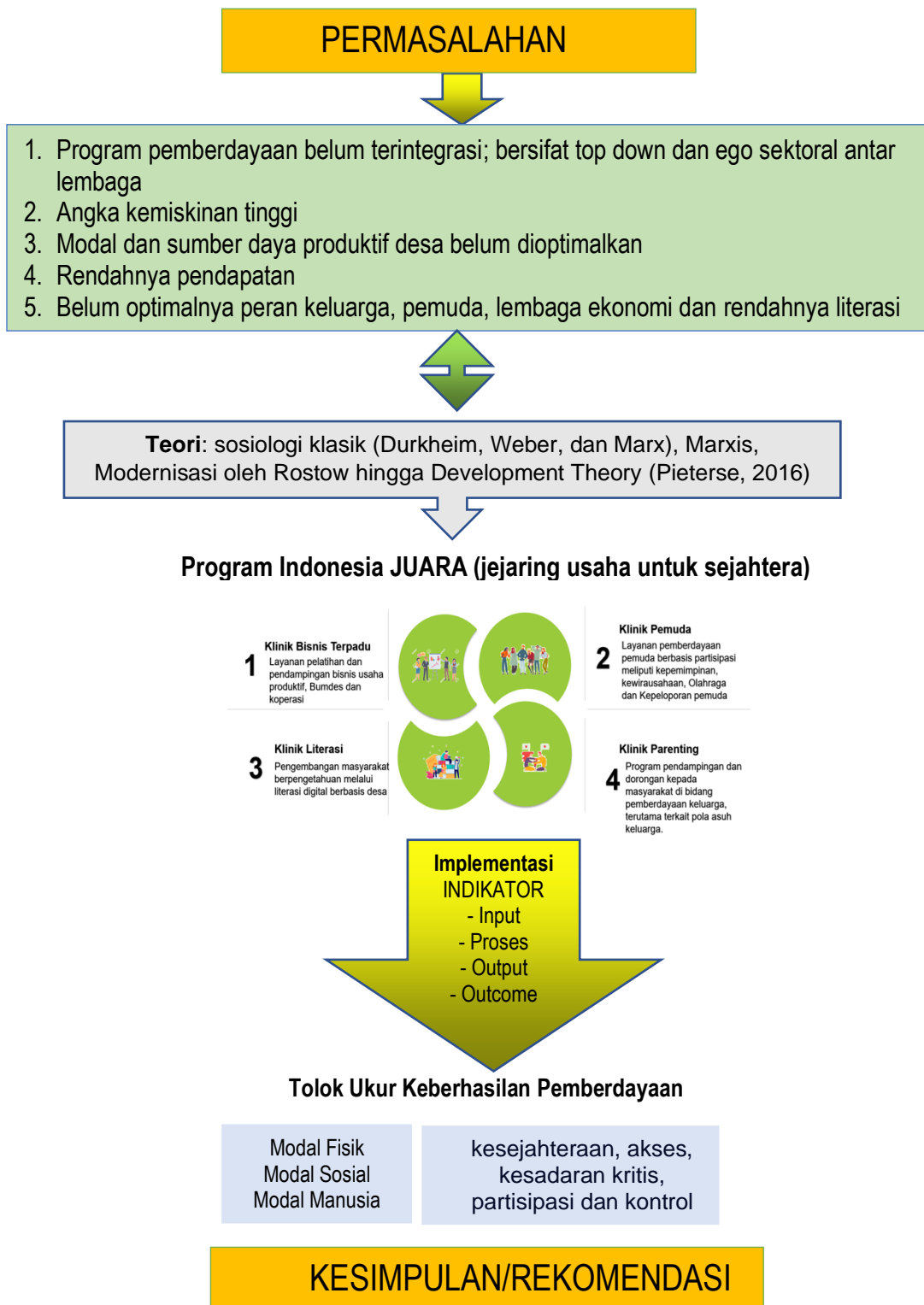
Pembangunan desa tidak bisa dilepaskan dengan pembinaan berbasis keluarga. Keluarga merupakan unit dasar masyarakat yang berperan penting dalam menghasilkan SDM yang berkualitas, Kapasitas keluarga mempunyai keberfungsian dan keberlangsungan masyarakat. Banyak masalah sosial yang terjadi berawal dari kegagalan/ketidakberfungsian keluarga sehingga menimbulkan berbagai implikasi sosial dan ekonomi dikalangan masyarakat desa.

Program Indonesia JUARA (jejaring usaha untuk sejahtera) adalah gerakan bersama membangun Indonesia menuju negara berdaulat, maju dan makmur, berbasis kekuatan dan sumber daya desa/kelurahan dan keluarga yang berintegritas, untuk meningkatkan kualitas hidup, dimulai dalam bentuk kegiatan bisnis (ekonomi) yang kemudian secara berlahan

akan berdampak kepada perubahan nilai-nilai sosial, pendidikan, budaya dan politik.

Jejaring adalah proses aktif membangun dan mengelola hubungan-hubungan yang produktif. Jejaring merupakan hubungan yang luas dan kokoh baik personal maupun organisasi. Adapun usaha bermakna kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. secara spesifik bermakna kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.

Skema Kerangka Pikir



Gambar 2.2 Skema Kerangka Pikir

Indikator hasil pemberdayaan masyarakat mengacu pada :

1. **Input**, meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Sosial, Sumber Daya fisik / Infrastruktur dan Sumber Daya keuangan yang ada di desa/kelurahan
2. **Proses**, meliputi kegiatan klinik terpadu meliputi jumlah pertemuan, penyuluhan, pelatihan, pendampingan yang dilaksanakan, frekuensinya, jumlah tokoh masyarakat yang terlibat dan lain-lain
3. **Output**, meliputi jumlah dan jenis usaha yang bersumber daya masyarakat, jumlah masyarakat yang telah meningkatkan pengetahuan dari perilakunya tentang parenting, kepemudaan, bisnis dan literasi
4. **Outcome**, dilihat dari hasil pemberdayaan masyarakat meliputi 5 aspek, yaitu **kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol.**

Adapun untuk keberhasilan program mengacu pada 3 modal desa meliputi modal manusia mengacu pada tenaga kerja yang tersedia untuk rumah tangga dengan pendidikan, keterampilan, dan kesehatan., fisik (cadangan makanan, ternak, mesin, jalan raya, sarana transportasi, pasar, sarana sanitasi, fasilitas air bersih, prasarana irigasi dll), dan modal sosial (dalam bentuk relasi sosial dan jaringan kerja).

Adapun 5 dimensi keberhasilan program pemberdayaan menurut UNICEF, yaitu :

- 1) **Kesejahteraan**, diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.
- 2) **Akses**, menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya.
- 3) **Kesadaran Kritis**, kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah, melainkan bersifat structural sebagai akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga yang dapat dan harus diubah.
- 4) **Partisipasi**, masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada, ikut andil dalam proses pengambilan keputusan.
- 5) **Kontrol**, semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan.